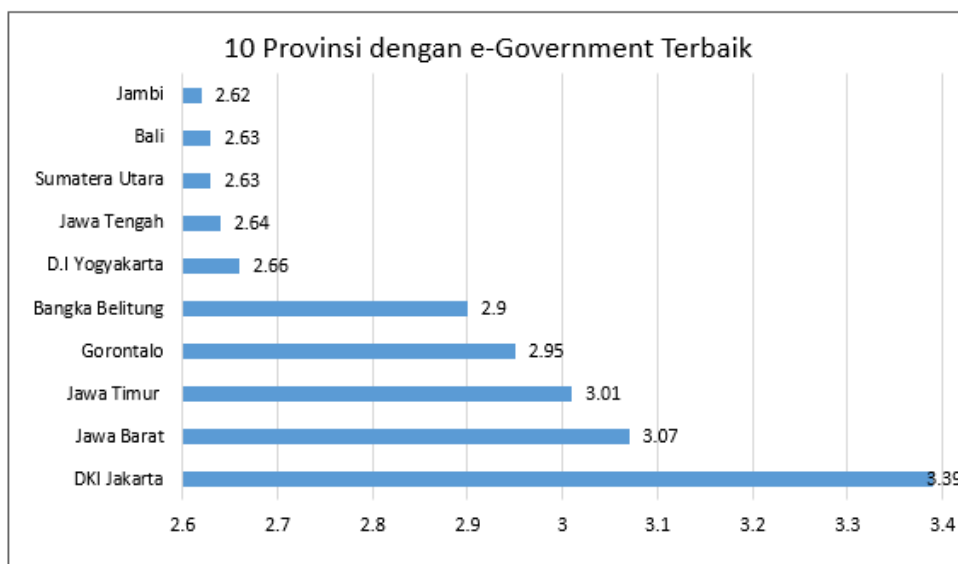


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambar Umum Objek Penelitian

Pemerintahan saat ini mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini *e-government*. Pada industri 4.0 hampir semua bidang salah satunya tata kelola pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mendukung *e-government* pemerintah mengeluarkan undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan harus terus dikembangkan, kemudian mengeluarkan Perpres No 9 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang diperlukan pemerintahan berbasis elektronik yang terpercaya dan berkualitas.

Alasan memilih Jawa Timur sebagai objek penelitian, menurut kementerian komunikasi informatika (2016), Jawa Timur menempati peringkat ke-tiga dengan kategori *E-government* terbaik. Dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. 1
Provinsi Dengan e-Government Terbaik
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Berdasarkan gambar 1.1 Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang memiliki nilai *e-government* terbaik setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai 3,01. Menurut kementerian komunikasi informatika Jawa Timur (2017), dalam kategori Pemerintah Provinsi terbaik tingkat nasional, Jawa Timur kembali meraih prestasi pertama dalam keterbukaan informasi publik. Jawa Timur masuk dalam kualifikasi menuju informatif dan berhasil meraih nilai 92,24 dengan menungguli provinsi lain seperti Aceh, Kalimantan Timur, Bantaen, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengan, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Berdasarkan penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan Provinsi Jawa Timur, dapat dikatakan sukses dalam penerapan *e-gooverment*. Namun ternyata masih banyak Kabupaten/Kotanya yang belum memanfaatkan dengan seutuhnya tingkat pengungkapan informasi terutama pada laporan keuangan disitus resminya seperti masih banyak yang tidak mengungkapkan ukuran pemerintahnya atau asetnya yang terdapat pada neraca, pendapatan asli daerah dan belanja daerah yang terdapat pada realisasi anggaran.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tujuan peyelenggaraan pemerintah daerah untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemerataan, keadilan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sektor publik merupakan sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah harus transparansi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan

pemerintah. Prinsip transparansi ini menimbulkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat. Tujuan dari informasi yang diberikan, agar masyarakat menambah wawasan terhadap penyelenggara pemerintah dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berkurangnya pelanggaran yang dikeluarkan undang-undang (Sri Mulyani; et al, 2019).

Dalam undang-undang No 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik “Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya”.

Akses untuk memberikan informasi dan bertukar informasi sekarang sudah semakin cepat dan mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti internet. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi kegiatan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi tentang strategi dan kebijakan *e-government* melalui instruksi Presiden RI No 3 tahun 2003, pemerintah harus memanfaatkan teknologi yang telah tersedia dengan melaksanakan proses transformasi menuju *e-government* atau sekarang dikenalnya sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres No 95 tahun 2018. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas. *E-government* atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Jaringan informasi dan pelayanan publik ini dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat luas serta dapat dijangkau atau diakses di seluruh Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh waktu.

E-government di Indonesia telah diterapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Indonesia sekarang berada di peringkat ke-57 untuk kesetaraan digital dengan kecepatan internet dari 65 negara di dunia. Menurut

Australia (2019) jumlah layanan *e-government* di Indonesia juga masih tertinggal dengan menduduki peringkat ke 9 dari bawah dengan skor 0,4604 dibanding dengan negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia mendapat peringkat ke-107 EDGI (*E-Government Development Index*) di tahun 2018, naik 9 peringkat dari 116 pada tahun 2016. Dalam ASEAN, Indonesia mendapat peringkat ke-7. Nilai rata-rata EDGI 0,5258 masih berada dibawah rata-rata sedangkan rata-rata EDGI dikawasan Asia Tenggara yaitu 0,5555. Hal ini dapat mendorong pemerintah lebih meningkatkan lagi implementasi *e-government* dan lebih meningkatkan kompetisi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (Widowati, 2018).

Menurut Madia (2018) pada tahun 2018 Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan kembali sebagai Pemerintah Provinsi Terinovatif versi *Innovative Government Award* (IGA) 2018 dengan mendapatkan peringkat kedua. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sukses dalam penerapan *E-government*, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan penghargaan yang didapat.

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi yang dilakukan oleh sektor publik atau pemerintahan melalui *website* pemerintah adalah fitur yang disebut pelaporan keuangan internet (*Internet Financial Reporting*). IFR yaitu kombinasi dari kapasitas multimedia dan kemampuan internet untuk menginformasikan keuangan secara interaktif. IFR sangat bermanfaat untuk pemerintah, karena memberikan kesempatan untuk menggunakan internet dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan dan menyebarluaskan laporan tersebut dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. IFR dalam penerapan *e-Government* merupakan alternatif yang paling tepat sebagai salah satu cara yang efektif yaitu hemat waku, hemat biaya bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi keuangan (Verawaty, 2017).

Ukuran pemerintah daerah Pratama, Werastuti, & Sujana (2015) diukur dari total aset setiap daerah. Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar cenderung memiliki keuangan yang kompleks, sehingga mendapatkan pengawasan yang lebih. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat mendorong adanya pengungkapan informasi keuangan dari pemerintah melalui internet, untuk

memenuhi pengawasan dan pelaporan agar tidak terjadi asimetri antara masyarakat dan pemerintah. Sesuai teori *signaling* dimana pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanat oleh masyarakat agar memberikan sinyal yang baik dalam hal memberikan informasi ukuran pemerintah atau aset yang dimiliki pemerintah dalam laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Menurut Annisa & Murtini (2018) ukuran pemerintah yang besar menunjukkan kekayaan yang besar pada suatu daerah. Masyarakat akan lebih ketat mengawasi setiap kegiatan pemerintah karena adanya kekhawatiran dalam penyalahgunaan dana oleh pemerintah, maka lebih banyak informasi keuangan yang akan dilaporkan kepada masyarakat agar tidak terjadi asimetri informasi. Pemerintah yang diberikan amanat oleh masyarakat agar memberikan sinyal yang baik dalam hal memberikan informasi yang dapat dipercaya dengan memberikan informasi ukuran pemerintah dalam. Pemerintah seharusnya memberikan informasi ukuran pemerintah yang dapat dilihat dalam aset pemerintah berupa laporan keuangan agar masyarakat. Menurut penelitian Simbolon & Kurniawan (2018) dan Pratama, Werastuti, & Sujana (2015) mengatakan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Ukuran pemerintah dalam artian total aset yang besar akan mendorong pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangan. Sedangkan Mutiha (2017) dan Ratmono (2015) mengatakan jika ukuran pemerintah tidak berpengaruh, hal ini dikarenakan total aset yang dimiliki pemerintah bukan faktor yang memengaruhi meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan pemerintah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan pada suatu daerah untuk memenuhi belanja suatu daerah. Menurut Verawaty (2018) pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah dapat bekerja dengan baik. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan memaksimalkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengungkapan informasi lebih banyak lagi. Sebaliknya, pendapatan asli daerah yang buruk maka

memberikan keterbatasan akses informasi kepada masyarakatnya. Sesuai dengan teori *signaling* pemerintah memberikan sinyal yang baik terhadap masyarakat dengan memberikan informasi pendapatan asli daerah yang didapatkan melalui laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah agar tidak terjadi asimetri informasi. Hasil penelitian dari Mutiha (2017) dan Alhajjriana, Nor, & Wijaya (2017) berpendapat jika belum tentu kenaikan PAD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan Firly (2019) berpendapat berpengaruh positif, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin meningkatnya pengungkapan laporan keuangan di *website*.

Belanja daerah Mutiha (2017) digunakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat daerah dengan berbagai saran dan prasaran yang dibutuhkan publik. Pemerintah daerah yang memiliki belanja daerah yang tinggi akan menunjukkan kepada publik bagaimana hasil kinerja mereka. Pengungkapan informasi kepada publik akan lebih mudah dengan menerapkan *e-government*. Belanja daerah dapat diukur dari total belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk mensejahterakan masyarakat daerah, dimana semakin tinggi belanja daerah menunjukkan bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan publik artinya keinginan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga semakin tinggi dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang baik dengan meningkatnya pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah. Sesuai dengan teori *signaling* pemerintah daerah memberikan sinyal kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintahan agar tidak terjadi asimetri informasi, maka pemerintah sebagai pemberi sinyal memberikan informasi belanja daerah yang telah dikeluarkan pemerintah melalui laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Hasil penelitian dari Firly (2019) dan Alhajjriana, Nor, & Wijaya (2017) mengatakan jika belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, semakin tinggi belanja daerah pada suatu pemerintahan, maka pemerintahan dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Sedangkan Verawaty (2018) dan Mutiha (2017) mengatakan jika belanja daerah tidak berpengaruh terhadap IFR, belanja daerah digunakan untuk meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pendidikan, kesehatan, fasilitas pelayanan, fasilitas sosial dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja daerah terhadap *internet financial reporting*” studi pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya pengungkapan laporan keuangan kepada publik dengan melakukan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Agar *e-government* dapat terwujud, pemerintah daerah melakukan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan agar prinsip-prinsip pemerintah daerah dapat terlaksanakan. *E-government* bisa diukur dengan ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 ?
- b. Apakah ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 secara simultan ?
- c. Apakah secara persial :
 - 1) Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 ?
 - 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 ?

- 3) Belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja daerah terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
- c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - 1) Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
 - 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
 - 3) Belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan manfaat teoritis dari pengembangan pengetahuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan *internet financial reporting*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber dan penunjang bagi penelitian selanjutnya mengenai ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan *internet financial reporting*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memotivasi pemerintah untuk lebih mengembangkan daerahnya dalam hal pengembangan situs resmi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat.
2. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaporan keuangan yang dapat diakses pada situs resmi pemerintah daerah.

1.6 Sistematik Penulis Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan, secara garis besar sistematika penulis penelitian ini terbagi menjadi :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Latar belakang yang berkaitan dengan fenomena dari objek penelitian sehingga layak untuk diteliti. Perumusan masalah dari latar belakang, tujuan penelitian dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah, manfaat penelitian dari segi aspek teoritis dan aspek praktis, serta sistematik penulis tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan landasan teori *internet financial reporting*, ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Teori yang dilengkapi dengan indikator setiap variabel yang digunakan. Pada bab ini membahas juga perbedaan dan persamaan variabel independen. Kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dengan *internet financial reporting*. Berdasarkan kerangka pemikiran disusun hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 membahas jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian, operasional variabel menguraikan struktur penelitian untuk mendapatkan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, pengumpulan dan sumber data yang diambil, dan teknik analisis data untuk mengolah data sehingga hasilnya dapat menjawab pertanyaan dan menjelaskan masalah dari penelitian yang dilakukan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 merupakan hasil penelitian dan pembahasan atas pertanyaan penelitian yang ada di perumusan masalah.

e. BAB V KESIMPULAN

Bab 5 membahas kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.